

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selama pemerintah Orde Lama yang dilanjutkan selama pemerintah Orde Baru dengan sistem sentralisasinya, belum bisa menciptakan pemerataan hasil pembangunan secara optimal. Hal ini terjadi karena dengan sistem sentralisasi tersebut semuanya terpusat dan tergantung pada pemerintah pusat, yang pada akhirnya pemerintah daerah tidak mau berkembang dan maju (Syaukani dkk, 1999: 210).

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan di mana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing dengan potensi yang dimilikinya. Otonomi daerah ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Antara Keuangan Pusat dan Daerah. Yang kemudian diperbaharui dengan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Keuangan Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah memiliki arti bahwa daerah memiliki kewenangan atas daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

undang-undang. Daerah otonom sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Otonomi Daerah tahun 2004)

Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 ini maka pelaksanaan pembangunan diserahkan sepenuhnya dan seluas – luasnya pada daerah. Daerah memiliki wewenang untuk menggali seluruh potensi daerah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan daerahnya sendiri, sehingga daerah memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembangunan yang sebesar-besarnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. Tetapi, ternyata pelaksanaan otonomi daerah ini tidak berjalan semulus apa yang diharapkan, karena tidak semua daerah memiliki kekayaan alam serta potensi daerah yang sama.

Pembangunan dan pengembangan ekonomi suatu daerah pada prinsipnya didasarkan oleh pemanfaatan dan pengolahan potensi kekayaan alam dan sumber-sumber lainnya yang tersedia di daerah tersebut. Potensi ekonomi suatu daerah adalah sumber kekayaan alam beserta hasil-hasilnya serta sumber daya manusia dan lain-lain yang tersedia di daerah (Kamuluddin, 1989: 90). Potensi daerah di berbagai sektor-sektor baik yang sudah dalam pengolahan maupun yang masih bersifat potensi, cukup banyak tersedia dan dapat diandalkan untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah tersebut.

Ada daerah yang kaya akan sumber daya dan ada daerah yang miskin akan sumber daya, baik itu sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM), yang akhirnya ada ketimpangan antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin. Selain itu dapat menjadi pelajaran, di mana pembangunan pada masa Orde Baru, di mana perencanaan pembangunan pada masa itu sudah tertata rapi, terarah, terencana, bertahan dan berkesinambungan. Akibatnya pemerataan hasil pembangunan tidak tercapai secara optimal. Selain itu, juga dari arah perencanaan pembangunan itu sendiri masih terdapat penyimpangan – penyimpangan.

Dengan otonomi daerah diharapkan pemerataan pembangunan dapat tercipta secara optimal, sehingga pada akhirnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat tercipta. Penyebab utama terhambatnya pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah ini karena daerah tidak mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh daerahnya, dalam artian daerah tidak tahu sektor apa yang memiliki potensi dan seharusnya dikembangkan. Dengan diketahuinya sektor unggulan dari daerah maka diharapkan adanya keunggulan kompetitif yang dapat menjadi andala daerah tersebut.

Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan suatu tantangan bagi propinsi Lampung. Propinsi Lampung mempunyai letak yang sangat strategis karena Lampung dijadikan sebagai daerah transit kegiatan perekonomian antara pulau Sumatera dan pulau Jawa, yang memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusia cukup baik. Propinsi Lampung dapat lebih berkembang dengan cepat asalkan pemerintah mampu untuk menganalisis sektor yang dapat menjadi unggulan.

Propinsi Lampung memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung, yaitu pantai sebagai objek wisata, hasil pertanian terutama kopi dan cengkeh, dll. Jika diketahui potensi ekonomi ini, maka akan sangat mudah propinsi Lampung melaksanakan pembangunannya. Langkah selanjutnya tinggal bagaimana usaha propinsi Lampung menarik investor untuk menanamkan modalnya di Lampung. Selain itu, untuk mencapai kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka propinsi Lampung harus mampu membangun kerjasama dengan daerah lain dengan menawarkan spesialisasi potensi yang dimiliki oleh propinsi Lampung. Dengan demikian arahan dari pelaksanaan pembangunan dalam otonomi daerah ini dapat tercapai, tentunya untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, khususnya propinsi Lampung dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumberdaya dan faktor produksi yang ada dalam menghasilkan barang dan jasa di suatu daerah maka dapat dilihat dari data PDRB daerah tersebut, PDRB dapat dibagi menjadi 3 sektor yaitu (PDRB propinsi Lampung tahun 2001):

1. Sektor primer meliputi,
  - sektor pertanian
  - sektor pertambangan dan penggalian
2. Sektor sekunder meliputi,
  - sektor industri
  - sektor listrik, gas dan air minum
  - sektor bangunan

3. Sektor tersier meliputi,

- sektor perdagangan, hotel dan restoran
- sektor pengangkutan dan komunikasi
- sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- sektor jasa-jasa

Besar kecilnya kontribusi dari setiap sektor-sektor ekonomi tersebut akan mempengaruhi PDRB. Besar kecilnya kontribusi dipengaruhi oleh perubahan atau pergeseran struktur ekonomi yang terjadi, yaitu sektor dari primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Dari pergeseran struktur ekonomi tersebut akan merubah share (sambungan) dari setiap sektor ekonomi terhadap PDRB dan pada akhirnya dapat menentukan sektor ekonomi mana yang merupakan sektor basis bagi daerah tersebut.

**Tabel 1.1**  
**PDRB Propinsi Lampung**  
**tahun 1994-2003 berdasarkan harga konstan**  
**(dalam jutaan rupiah)**

Sektor	1994	1998	2003
Sektor Primer	2.106.021	2.500.826	3.196.862,6
Sektor Sekunder	1.364.673	1.655.612	1.770.777
Sektor Tersier	2.325.847	2.544.741	3.296.277,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung tahun, 1994, 1998, 2003

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 1993 nilai produksi sektor primer Rp 2.106.021 juta. Pada tahun 1998 nilai sektor produksi

mengalami peningkatan menjadi Rp 2.500.826 juta. Peningkatan dratis terjadi di tahun 2003, nilai produksi sektor primernya hingga mencapai Rp 3.196.862,6 juta.

Untuk sektor sekunder, nilai produksinya pada tahun 1993 sebesar Rp 1.364.673 juta. Pada tahun 1998 nilai sektor sekunder mengalami peningkatan Rp 1.655.612 juta. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2003, nilai produksi sekunder ini untuk tahun 2003 hingga mencapai Rp 1.770.777 juta . Untuk sektor tersier, nilai produksinya pada tahun 1993 sebesar Rp 2.325.847 juta. Pada tahun 1998 nilai sektor tersier mengalami peningkatan Rp 2.544.741 juta. Nilai produksi sektor tersier meningkat dratis di tahun 2003 sebesar Rp 3.296.277,67 juta.

**Tabel 1.2**  
**PAD dan APBD**  
**di Propinsi Lampung tahun 1999-2003**  
**(Ribuan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>APBD</b>
1999	59.663.468	222.356.191
2000	77.941.737	261.153.132
2001	139.109.346	453.333.596
2002	242.924.573	663.984.775
2003	312.762.683	834.139.854

Sumber : Dinas Pendapatan dan Biro Keuangan Propinsi Lampung tahun 2003

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Penerimaan Asli Daerah (PAD) sangat kecil bila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga propinsi Lampung perlu meningkatkan dan menentukan sektor mana yang berpotensi untuk pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan melihat permasalahan tadi di atas maka penulis merasa penting untuk mengetahui keunggulan potensi ekonomi yang dimiliki propinsi Lampung , sehingga pemerintah propinsi Lampung dapat dengan mudah menentukan arah pembangunan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonominya. Guna mengangkat permasalahan tersebut maka penulis memberi judul sebagai berikut :

**POTENSI EKONOMI DI PROPINSI LAMPUNG DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH PERIODE TAHUN 1994 – 2003**

**1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana perubahan struktur ekonomi propinsi Lampung selama periode 1994 – 2003 ?
2. Sektor ekonomi mana yang potensial untuk dikembangkan di propinsi Lampung ?
3. Seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi propinsi Lampung selama periode 1994 – 2003 ?

**1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi propinsi Lampung selama periode 1994 – 2003.
2. Untuk mengetahui analisis sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di propinsi Lampung
3. Untuk menganalisis laju pertumbuhan ekonomi propinsi Lampung selama priode 1994 – 2003

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademik**

- a. Dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu mata kuliah perencanaan ekonomi pembangunan dan ekonomi regional.
- b. Bagi penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan secara teoritis yang di dapat di bangku kuliah terhadap aplikasi yang didapatkan dalam dunia praktis.
- c. Bagi peneliti yang lain: dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat jadi bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian – penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah propinsi Lampung: dapat memberikan sumbangan informasi mengenai struktur ekonomi, potensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi propinsi, sebagai bahan dalam melakukan kebijakan yang akan diambil yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dan arahan dalam melaksanakan pembangunan.
- b. Bagi para investor atau penanam modal dapat memberikan informasi mengenai potensi ekonomi yang dimiliki propinsi Lampung, sehingga dapat memberikan gambaran sektor apa yang cocok untuk dikembangkan di propinsi Lampung.



#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

- Bab I** : Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II** : Gambaran umum propinsi lampung yang meliputi letak geografis, kependudukan, kondisi ketenagakerjaan, keuangan daerah, kondisi sosial dan ekonomi, kondisi sektor-sektor ekonomi .
- Bab III** : Kajian Pustaka yang meliputi beberapa penelitian mengenai potensi ekonomi sebelumnya.
- Bab IV** : Landasan Teori yang berisikan teori-teori pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan daerah, basis ekonomi, konsep *shift share*, dan pengertian PDRB
- Bab V** : Metode Penelitian yang berisikan jenis penelitian, daerah penelitian, sumber data, objek penelitian, alat analisis.
- Bab VI** : Analisis dan Pembahasan yang berisikan analisis *shift share*, analisis *location quotient*, dan laju pertumbuhan.
- Bab VII** : Kesimpulan dan Implikasi yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Letak Geografis**

Daerah propinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km<sup>2</sup>, termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh (*Lampung dalam Angka, 2002*) :

- Sebelah utara : Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
- Sebelah selatan : Selat Sunda
- Sebelah timur : Laut Jawa
- Sebelah barat : Samudra Indonesia

Secara geografis propinsi Lampung mempunyai posisi sangat strategis, karena merupakan daerah pintu gerbang yang menghubungkan daerah-daerah yang ada di pulau Sumatera dengan daerah-daerah yang ada di pulau Jawa.

Sebelum tahun 1964, Lampung merupakan suatu keresidenan, termasuk dalam wilayah propinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1964, Lampung diresmikan menjadi sebuah propinsi dengan ibukota Bandar Lampung, yaitu sebuah kota yang berasal dari Tanjung Karang dan Teluk Betung. Pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No.12 Tahun 1999, propinsi Lampung mempunyai 10 kabupaten / kota yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota.

Secara topografi daerah Lampung dapat dibagi menjadi 5 unit topografi yaitu :

1. Daerah topografis berbukit sampai bergunung :

Lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 M diatas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pasawaran dan Gunung Rajabasa. Yang terakhir ini berlokasi di Kalianda dengan ketinggian rata-rata 1.500 M. Puncak-puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi, Sekincau yang terdapat dibagian utara. Daerah tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder.

2. Daerah topografis berombak sampai bergelombang :

Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit sempit, kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 M sampai 500 M dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pengunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat didaerah ini adalah tanaman-tanaman perkebunan seperti : kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian peladangan seperti : padi, jagung, dan sayur-sayuran. Daerah tersebut meliputi daerah-daerah : Kedaton di wilayah Kota Bandar Lampung, Gedong Tataan di Kabupaten Lampung Selatan, Sukoharjo dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus serta Kalirejo dan Bangunrejo di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

3. Daerah dataran Alluvial :

Daerah ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah, Lampung Timur dan Tulang Bawang, yang merupakan bagian hilir dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 M sampai 75 M, dengan kemiringan 0% sampai 3%. Pada bagian pantai sebelah Barat dataran Alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan.

4. Daerah dataran Rawa Pasang Surut :

Disepanjang pantai timur adalah merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian  $\frac{1}{2}$  M sampai 1 M, pengedapan air menurut naiknya pasang air laut.

5. Daerah River Basin :

Meliputi River Basin Tulang Bawang, River Basin seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, River Basin Way Jepara.

Kawasan bagian barat Propinsi Lampung merupakan daerah pegunungan sebagai rangkain dari Bukit Barisan Propinsi Lampung juga memiliki tiga buah gunung yang tingginya lebih dari 2000 M dari permukaan laut, yaitu Gunung Pesagi di Kabupaten Lampung Barat (2.239 M), Gunung Tanggamus (2.102 M) dan Gunung Tebak di Kabupaten Lampung Utara (2.315 M).

## 2.2. Kependudukan

Kepadatan penduduk Propinsi Lampung dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas

2001), jumlah penduduk Propinsi Lampung tahun 2001 tercatat sebesar 6.720.260 orang, sebanyak 3.465.901 orang adalah laki-laki dan 3.254.359 orang adalah perempuan. Untuk mengetahui jumlah penduduk Propinsi Lampung dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**

**Jumlah penduduk Propinsi Lampung tahun 1994-2003**

<b>Tahun</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>
1994	3.528.835	6.244.484
1995	3.528.835	6.309.591
1996	3.528.835	6.375.933
1997	3.528.835	6.443.544
1998	3.528.835	6.512.460
1999	3.528.835	6.582.717
2000	3.528.835	6.659.869
2001	3.528.835	6.720.260
2002	3.528.835	6.787.654
2003	3.528.835	6.852.999

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung tahun 2003

### 2.3. Kondisi Ketenagakerjaan

Jika dilihat sudut pandang ekonomi, penduduk dapat menjadi sumber tenaga kerja, tetapi dapat juga menjadi beban pemerintah setempat. Namun, jika potensi penduduk tersebut dapat diolah secara efektif maka segi negatifnya akan berkurang.

Upah Minimum Regional (UMR) daerah Lampung pada tahun 2001 sebesar Rp 310.000/bulan, sedangkan besarnya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) perkerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung tahun 2001 sebesar Rp 325.000/bulan (kumulatif) (*Lampung dalam Angka*, 2002).

Pada tahun 2000, penduduk Propinsi Lampung paling banyak berkerja di sektor pertanian, perternakan, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 1.730.378 orang, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 221.453 orang (*Lampung dalam angka*, 2002).

#### 2.4. Keuangan Daerah.

**Tabel 2.2**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Propinsi Lampung tahun 1999 – 2003 (Ribuan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>
1999	222.356.191
2000	261.153.132
2001	453.333.596
2002	663.984.775
2003	834.139.854

Sumber : Biro Keuangan Propinsi Lampung tahun 2003

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pemerintah propinsi Lampung menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dalam setiap tahun anggaran. Pada tahun anggaran 1999 jumlah APBD di propinsi Lampung Rp 222.356.191, tahun 2000 APBD meningkat Rp 261.153.132 ribu, APBD di propinsi Lampung setiap tahunnya slalu mengalami peningkatan sampai tahun 2003 jumlah APBD mencapai Rp 834.139.854 ribu.

Sektor transportasi merupakan sektor yang paling banyak menyerap anggaran belanja pembangunan Propinsi Lampung yaitu sebesar Rp 36.820.000 atau sekitar 30,08 persen dari total anggaran belanja pembangunan. Sedangkan sekretariat Pemda Propinsi Lampung menyerap anggaran belanja rutin paling besar yaitu Rp 380.840.000 atau sekitar 16,39 persen dari total anggaran.

Sumber-sumber pendapatan daerah Propinsi Lampung yang utama adalah dari penerimaan pajak kendaraan dan retribusi, pajak bumi dan bangunan (PBB), subsidi dan pemerintah pusat, serta investasi baik yang dilakukan oleh pemodal dari dalam negeri maupun modal asing.

**Tabel 2.3**  
**Penerimaan Asli Daerah**  
**Propinsi Lampung tahun 1999 – 2003 (Ribuan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>
1999	59.663.468
2000	77.941.737
2001	139.109.346
2002	242.924.573
2003	312.762.683

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung tahun 2003

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pemerintah propinsi Lampung menyusun Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang disusun dalam setiap tahun anggaran. Pada tahun anggaran 1999 jumlah PAD di propinsi Lampung Rp 59.663.468, tahun 2000 PAD meningkat Rp 77.941.737 ribu, PAD di propinsi Lampung setiap tahunnya slalu mengalami peningkatan sampai tahun 20003 jumlah PAD mencapai Rp312.762.683 ribu

Kemudian sebagai sarana penunjang aktifitas keuangan, di Propinsi Lampung selain terdapat bank pemerintah juga terdapat sejumlah bank swasta dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jumlah bank pemerintah dan BRI pada tahun 2001 masih sama dengan kondisi pada tahun 2000 yang masing-masing sebanyak 38 buah dan 71 buah, begitu juga jumlah bank swasta yaitu, sebanyak 53 buah. Selain perbankan, sarana keuangan lainnya adalah koperasi, dimana pada tahun 2001 terdapat 2433 buah koperasi.

## 2.5. Kondisi Sosial dan Ekonomi

**Tabel 2.4**  
**Jumlah sekolah, murid menurut jenis sekolah**  
**Propinsi Lampung tahun 2003**

Jenis sekolah	Status	Jumlah Sekolah	Jumlah murid
Sekolah Dasar	Negeri	4.340	930.155
	Swasta	164	13.867
	Jumlah	4.504	944.022
SLTP	Negeri	306	161.008
	Swasta	807	135.008
	Jumlah	1.113	296.016
SMU	Negeri	86	48.195
	Swasta	171	41.381
	Jumlah	257	89.576
SMK	Negeri	19	11.091
	Swasta	149	58.849
	Jumlah	168	69.940

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, tahun 2003

Banyaknya sekolah pada tingkat yang lebih tinggi cenderung lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta. Pada tingkat SD dari 4.504 sekolah terdapat 4.340 sekolah negeri dan 164 sekolah swasta dengan jumlah siswi yang dimiliki 944.022 orang. Pada tingkat SMP berjumlah 1.113 sekolah terdiri dari 306 sekolah negeri dan 807 sekolah swasta dengan jumlah siswi yang dimiliki 296.016 orang. Pada tingkat SMU dari 257 sekolah terdapat 86 sekolah negeri dan 171 sekolah swasta dengan jumlah siswi yang dimiliki 89.576 orang. Pada tingkat SMK dari 168 SMK terdapat 19 sekolah negeri dan 149 sekolah swasta dengan jumlah siswi yang dimiliki 69.940 orang.

Produksi padi di Propinsi Lampung mengalami peningkatan dari 1.946.406 ton pada tahun 2000 menjadi 1.992.689 ton pada tahun 2001 atau sekitar 2,38% dengan Sentra produksi padi terbesar di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 437.659 ton atau 20,96% dari total produksi padi di



Propinsi Lampung. Produksi palawija pada tahun 2001 sedikit bervariasi, jagung, ubi jalar dan kedelai mengalami penurunan. Produksi kedelai pada tahun 2001 turun dratis sekitar 46,46% dibandingkan tahun 2000 yaitu 22.457 ton pada tahun 2000 menjadi 12.024 ton pada tahun 2001, sedangkan palawija yang produksinya mengalami peningkatn adalah ubi kayu, kacang tanah dan kacang hijau.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembangunan ekonomi wilayah, sektor industri pengolahan biasanya dijadikan sektor andalan untuk menumbuhkan perekonomian dan mengembangkan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung sebanyak 48.214 buah terdiri dari 706 unit usaha industri menengah/besar dan 47.508 unit usaha industri kecil. Dengan demikian jumlah industri di Propinsi Lampung tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 4,02% dibandingkan dengan tahun 2000. demikian juga dengan jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 6,03% yaitu 279.275 orang pada tahun 2000 menjadi 296.129 orang pada tahun 2001.

## **2.6. Kondisi Sektor-sektor Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Lampung sepanjang tahun 1994 sampai dengan tahun 2002, mengalami peningkatan dan juga penurunan. Untuk lebih jelasnya, perkembangan PDRB Propinsi Lampung tahun 1994-2003 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 1993, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**PDRB Propinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993**  
**Menurut Lapangan Usaha Periode 1994-2003 (Jutaan Rupiah)**

Tahun	Sektor										Jumlah
	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengeolaan	Listrik, Gas, dan Air Bersih	Bangunan	Perdagangan	Transportasi dan Komunikasi	Keuangan	Jasa-Jasa		
1994	1.999.906	106.115	840.946	28.333	495.394	923.799	431.105	332.952	637.991	5.796.541	
1995	2.274.651	121.664	917.033	34.141	603.472	966.953	461.244	374.787	650.874	6.404.819	
1996	2.351.882	144.230	1.003.761	40.174	718.514	1.061.228	515.747	412.778	665.897	6.914.221	
1997	2.253.094	158.342	1.092.028	51.838	790.364	1.157.240	563.666	462.085	672.681	7.201.338	
1998	2.403.995	96.831	1.093.580	56.532	505.500	1.045.821	542.133	334.976	621.811	6.701.179	
1999	2.613.954	159.037	958.793	66.577	481.425	1.084.320	566.051	382.387	625.881	6.938.425	
2000	2.623.104	173.993	982.271	76.226	526.797	1.102.315	668.054	382.152	639.342	7.174.254	
2001	2.708.911	179.557	1.016.369	87.360	554.693	1.114.189	710.118	388.877	672.991	7.433.265	
2002	2.720.587	265.032	1.040.422	90.617	577.640	1.182.092,92	753.308	492.079	695.563,46	7.817.341,38	
2003	2.911.775,6	285.087	1.084.848	89.721	596.208	1.221.405,98	803.737	564.875	706.259,69	8.263917,27	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung

Berdasarkan tabel tersebut, nilai PDRB Propinsi Lampung pada tahun 1994 sebesar Rp 5.796.541 juta, pada tahun 1997 nilai PDRB Propinsi Lampung mengalami peningkatan menjadi Rp 7.201.338 juta namun pada tahun 1998 dan tahun 1999 nilai PDRB Propinsi Lampung mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp 6.701.179 juta dan Rp 6.877.825 juta, hal ini disebabkan karena pada tahun 1998 dan tahun 1999 Indonesia mengalami krisis ekonomi, sampai dengan tahun 2003 nilai PDRB Propinsi Lampung mengalami peningkatan kembali menjadi Rp 8.263.917,27 juta. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan gambaran perekonomian Propinsi Lampung secara sektoral.

#### **2.6.1 Sektor Pertanian, Pertenakan, Kehutanan dan Perikanan**

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan mencakup tanaman bahan makanan (komoditas yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedele, buah-buahan, sayuran dan tanaman hias). Berdasarkan tabel tersebut, nilai produksi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Propinsi Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1994 nilai produksi sektor ini sebesar Rp 1.999.906 juta dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp 2.911.775,6 juta pada tahun 2003.

#### **2.6.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian**

Sektor ini mencakup kegiatan pertambangan dan penggalian oleh usaha perorangan maupun perusahaan. Sektor ini terdiri dari subsektor pertambangan

migas (komoditas yang dihasilkan adalah minyak mentah dan gas), pertambangan bukan migas (untuk Propinsi Lampung, subsektor ini hanya mencakup pertambangan emas, perak dan biji besi), dan penggalian (komoditas yang dihasilkan adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat).

Nilai produksi sektor ini terhadap PDRB mengalami peningkatan dari sebesar Rp 106.115 juta pada tahun 1994 menjadi Rp 158.342 juta pada tahun 1997 kemudian mengalami penurunan pada tahun 1998 dan tahun 1999 masing-masing sebesar Rp 96.831 juta dan Rp 95.011 juta dan meningkat kembali menjadi Rp 285.087 juta pada tahun 2003.

### **2.6.3 Sektor Industri Pengolahan**

Sektor industri pengolahan mencakup kegiatan pengolahan bahan bukan organik maupun bahan organik menjadi produk baru yang lebih tinggi nilainya. Sektor industri pengolahan terdiri dari subsektor industri pengolahan migas dan sub sektor industri pengolahan bukan migas. Untuk Propinsi Lampung, sektor industri pengolahan hanya mencakup subsektor industri pengolahan bukan migas.

Nilai produksi sektor ini terhadap PDRB Propinsi Lampung tertinggi pada tahun 1997 yaitu sebesar Rp 1.093.580 juta dan mengalami penurunan pada tahun 1999 dan tahun 2000 nilainya masing-masing menjadi sebesar Rp 958.793 juta dan Rp 982.271 juta.

#### **2.6.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih**

Untuk Propinsi Lampung sektor ini hanya mencakup sub sektor listrik dan sub sektor air bersih, karena sampai saat ini usaha yang menghasilkan komoditas gas belum ada. Subsektor listrik meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian jaringan distribusi listrik kepada konsumen. Kegiatan ini dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) maupun oleh unit usaha non PLN, termasuk listrik yang dibangkitkan oleh perusahaan industri atau perusahaan jasa yang dijual kepada pihak lain. Sub sektor air bersih meliputi kegiatan penampungan dan penjernihan air bersih serta pendistribusian dan penyalurannya kepada konsumen melalui pipa atau alat lain.

Dari tahun ke tahun sektor ini terus mengalami peningkatan, pada tahun 1994 sebesar Rp 28.333 juta dan meningkat terus sampai dengan tahun 2003 menjadi Rp 89.721 juta.

#### **2.6.5 Sektor Bangunan**

Sektor bangunan mencakup kegiatan, pembuatan perluasan, pemasangan, perbaikan besar dan ringan serta perombakan bangunan. Komoditas dari kegiatan ini adalah bangunan tempat tinggal, jalan, jembatan, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi. Kegiatan pemasangan instalasi listrik, saluran telepon, alat pendingin serta perbaikan bangunan tempat tinggal yang dilakukan sendiri oleh rumah tangga, lembaga swasta dan pemerintah termasuk kedalam sektor ini.

Nilai produksi terbesar pada sektor ini adalah PDRB adalah pada tahun 1997 sebesar Rp 790.364 juta, pada tahun-tahun sebelumnya sektor ini selalu

mengalami peningkatan dan pada tahun 1998 dan tahun 1999 kembali mengalami penurunan masing-masing hanya menjadi sebesar Rp 505.500 juta dan Rp 484.575 juta, tetapi kemudian meningkat sedikit demi sedikit sampai dengan tahun 2003 menjadi Rp 596.208 juta.

#### **2.6.6 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran**

Sektor perdagangan mencakup kegiatan pembelian dan penjualan barang guna didistribusikan kepada konsumen tanpa mengubah wujud. Kegiatan ini terdiri dari perdagangan besar dan perdagangan eceran. Subsektor hotel mencakup kegiatan penyediaan penginapan, termasuk penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas lain yang masih dalam satu kesatuan dengan kegiatan penginapan. Sub sektor restoran ini mencakup rumah makan, usaha katering, restorasi kereta api, cafetaria dan kantin.

Sama seperti sektor-sektor lain, sektor perdagangan, hotel dan restoran juga mengalami peningkatan dan penurunan, nilai produksi terkecil sektor ini terhadap PDRB pada tahun 1994 sebesar Rp 431.105 juta dan terus meningkat menjadi Rp 1.221.405,98 juta pada tahun 2003

#### **2.6.7 Sektor Transportasi dan Komunikasi**

Sektor transportasi meliputi kegiatan jasa angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan alat angkut bermotor, jasa angkutan rel, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta angkutan udara. Sektor komunikasi meliputi kegiatan pengiriman melalui jasa pos,

telekomunikasi dan kegiatan jasa penunjang komunikasi seperti jasa pengiriman berita melalui telegram dan telepon.

Nilai produksi sektor ini transportasi dan komunikasi terhadap PDRB pada tahun 1994 sebesar Rp 431.105 juta dan mengalami peningkatan dratis sebesar Rp 803.737 juta pada tahun 2003

#### **2.6.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**

Sektor keuangan meliputi kegiatan asuransi, koperasi simpan pinjam, pegadaian. Sektor persewaan meliputi kegiatan persewaan bangunan dan tanah. Sewa bangunan tempat tinggal meliputi sewa, kontrak dan sewa beli rumah. Sektor jasa perusahaan meliputi kegiatan jasa pelayanan dan konsultasi hukum, jasa akuntansi dan pembukuan, jasa periklanan.

Nilai produksi ini mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan nilai produksi sektor ini terus berlangsung dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 tetapi pada tahun 1998 dan tahun 1999 nilai produksi sektor ini mengalami penurunan. Sebagai akibat adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1998 dan tahun 1999, tetapi kemudian dapat meningkat kembali menjadi Rp 564.875 juta pada tahun 2003.

#### **2.6.9 Sektor Jasa-jasa**

Sektor jasa ini terbagi dalam dua subsektor, yaitu sub sektor jasa pemerintah umum dan pertahanan dan subsektor jasa swasta. Subsektor jasa pemerintah umum dan pertahanan dan kegiatan pelayanan jasa pemerintah

lainnya. Subsektor swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi dan jasa perorangan.

Nilai produksi sektor ini terhadap PDRB mengalami peningkatan dari sebesar Rp 637.991 juta pada tahun 1994 menjadi Rp 672.681 juta pada tahun 1997 kemudian mengalami penurunan pada tahun 1998 dan tahun 1999 masing-masing sebesar Rp 621.681 juta dan Rp 629.717 juta dan meningkat kembali menjadi Rp 706.259,69 juta pada tahun 2003



### **BAB III**

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Beberapa penelitian mengenai potensi ekonomi sebelumnya sudah dilakukan oleh Erisfistryawaty pada tahun 2003 dengan judul “Analisis Sektor Ekonomi Potensial di Propinsi Kalimantan Selatan melalui alat analisis pendekatan Location Quotient dan shift share periode 1997-2001”. Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa selama periode 1997 -2001 dengan perhitungan Location Quotient sektor yang potensial atau sektor yang berpotensi di propinsi Kalimantan Selatan adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi karena hasil dari analisis LQ lebih dari satu ( $LQ > 1$ ), hal ini berarti propinsi Kalimantan Selatan dapat memenuhi kebutuhan akan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan dengan perhitungan shift share, sektor ekonomi yang pertumbuhannya paling cepat di propinsi Kalimantan Selatan adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa.

Ahmad Ma'ruf pada tahun 2003 melakukan penelitian dengan judul “Penentuan Sektor Unggulan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui alat analisis pendekatan Location Quotient dan shift share periode 1993-2002”. Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa selama periode 1993 -2002 dengan perhitungan Location Quotient sektor yang potensial atau sektor yang berpotensi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sektor pertanian, sektor

bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sektor jasa-jasa karena hasil dari analisis LQ lebih dari satu ( $LQ > 1$ ), hal ini berarti Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memenuhi kebutuhan akan sektor pertanian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sektor jasa-jasa. Sedangkan dengan perhitungan shift share, sektor ekonomi yang pertumbuhannya paling cepat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan.

Jhem's Jeffrey pada tahun 2003 dengan judul "Analisis Sektor Basis di Daerah Istimewa Yogyakarta di tinjau Per Daerah Tingkat II melalui pendekatan Location Quotien periode 1993 -1995". Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa selama periode 1993 -1995 sektor jasa memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor lain yang merupakan sektor basis perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Daryono pada tahun 2001 dengan judul penelitian "Perubahan Struktur Perekonomian dan Penentuan Sektor Basis Jawa Barat". Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan selama periode 1983 - 1998 sektor basis Propinsi Jawa Barat adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Yumahhadi Idris pada tahun 1997 juga melakukan penelitian dengan judul "Analisis Struktur Perekonomian Aceh tahun 1983-1993". Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa struktur perekonomian propinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1983-1993 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor pemimpin atau *leading sector*, yang berarti bahwa sektor pertambangan merupakan sektor yang perannya atau kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB propinsi D.I. Aceh paling besar.

Dilihat dari kontribusi kelompok sektor menunjukkan bahwa kontribusi sektor primer cukup besar terhadap pembentukan pertumbuhan PDRB. Walaupun kontribusinya cukup besar tetapi arah pertumbuhannya semakin menurun sedangkan untuk kelompok sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan adanya kecenderungan mengalami grafik naik, meskipun pertumbuhannya lambat.

Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ) dapat disimpulkan bahwa sektor yang paling potensial dan yang paling diandalkan dalam pertumbuhan pendapatan regional (PDRB) di propinsi D.I. Aceh selama tahun 1983-1993 adalah sektor pertambangan dan penggalian. Nilai LQ yang dimiliki sektor tersebut sejak tahun 1983 hingga 1993 menunjukkan angka di atas satu. Sementara sektor-sektor lain belum menjadi sektor basis karena kriteria sektor basis yakni sektor yang nilai  $LQ > 1$  maka sektor yang lain belum mencapai kriteria tersebut. Sektor lain yang mempunyai potensi besar untuk menjadi sektor basis adalah sektor pertanian.

Dari gambaran penelitian tersebut sudah sangat bagus sekali di mana penelitian terdahulu sudah berhasil menunjukkan sektor basis yang dimiliki

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Propinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Aceh yang sangat potensial untuk dikembangkan. Tetapi dari ketiga penelitian terdahulu ini penulis masih menilai ada kekurangannya di mana peneliti terdahulu baru menentukan sektor – sektor basis dan perubahan struktur ekonomi, melalui alat analisis *shift share* dan *location quotient* saja serta belum didukung perhitungan besarnya laju pertumbuhan ekonomi secara riil.

Dengan melihat penelitian terdahulu penulis berpikir untuk membantu arah pembangunan di propinsi Lampung maka apabila penulis melakukan penelitian akan sektor – sektor ekonomi potensi yang didasarkan atas perubahan struktur ekonomi propinsi Lampung sehingga penulis akan melengkapi penelitiannya dengan meneliti seberapa besar laju pertumbuhan ekonominya selain itu juga penulis akan memadukan ketiga alat analisis tadi sebagai alat dalam pencapaian pembentukan potensi ekonomi propinsi Lampung dalam rangka otonomi daerah. Sehingga proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di propinsi Lampung akan tercapai yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan tercipta.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar

pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan pemerataan yang sebaik mungkin (PDRB Propinsi Lampung, 2001 : 1)

Sasaran dari pembangunan ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa tumbuh maka pembangunan ekonomi di daerah tersebut bisa terwujud. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa dilihat melalui indikatornya yaitu produk domestik regional bruto (PDRB).

Dengan bantuan analisis *shift share* penulis dapat mengetahui pergeseran struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional atau regional dan dengan bantuan location quotient sektor – sektor ekonomi dapat dikelompokkan menjadi sektor yang potensial dan tidak potensial serta dengan bantuan alat analisis persentase pertumbuhan ekonomi penulis dapat menganalisis laju pertumbuhan ekonominya.

Dengan bantuan alat analisis di atas maka penulis bisa melakukan penelitian seberapa besar perubahan struktur ekonomi dan sektor apa yang potensial untuk dikembangkan serta seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi propinsi Lampung. Sehingga dengan bantuan ketiga alat analisis ini penulis dapat mengetahui kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah propinsi Lampung dalam melaksanakan pembangunan ekonominya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi propinsi Lampung.

Dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi propinsi Lampung maka pelaksanaan pembangunan ekonomi propinsi Lampung dapat terwujud pula serta

berjalan lancar. Sehingga pada akhirnya tujuan dari pembangunan ekonomi propinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai.